

KINERJA IMPLEMENTASI STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA UNTUK UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

Juraidah¹, Fajar Apriani², Anwar Alaydrus³

¹²³ Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Mulawarman

Alamat Korespondensi : adejuraidaho8@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the Policy Strategy Implementation Performance of Government of Samarinda for MSME / **UMKM** during Covid-19 pandemic, and to analyze several obstacles for MSME / **UMKM** which are faced by Samarinda Government. This study used a qualitative model and analyzed using a desriptif data model. The result of the study presents that the Government of Samarinda through Department of Cooperatives and SMEs in the Policy Strategy Implementation Performance for MSME during Covid-19 pandemic in the form of various programs namely, Behambinan, Bazaar, BLT, BPUM, is right and goes well. It can be seen from the increasing growth of MSMEs during the COVID-19 pandemic. The policy which is implemented in the three districts has met expectations and it has been in accordance with the interests of societies. The obstacles which are faced in the Policy Strategy Implementation Performance are the MSMEs who do not want to do some improvement, lack of human resources in government agencies that are disproportionate to the number of MSMEs, suboptimal data collection of the MSME, lack of information and socialization to the MSMEs regarding government assistance program.*

Keyword: *Policy Performance, Policy Strategy, Small and Medium Enterprises (SME).*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja implementasi strategi kebijakan Pemerintah Kota Samarinda untuk UMKM di Kota Samarinda selama masa pandemi Covid-19 dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Samarinda dalam kinerja implementasi strategi untuk UMKM selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan model kualitatif dan dianalisis menggunakan model data deskriptif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Koperasi dan UKM dalam kinerja strategi kebijakan untuk UMKM di masa pandemi COVID-19 dalam bentuk berbagai program diantara Behambinan, Pasar Murah, BLT, BPUM, sudah tepat dan berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dengan semakin

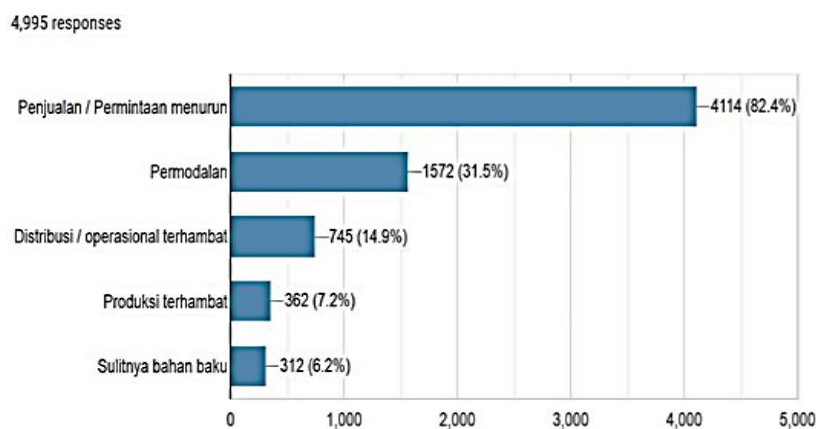
meningkatnya pertumbuhan UMKM selama masa pandemi COVID-19. Kebijakan yang ada dan dijalankan di ketiga Kecamatan sudah sesuai dengan harapan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Kendala yang dihadapi dalam kinerja strategi kebijakan itu sendiri adalah para pelaku UMKM yang masih belum mau berkembang, kurangnya SDM di instansi pemerintahan yang tidak proporsional dengan jumlah UMKM, pendataan UMKM yang masih kurang maksimal, kurangnya informasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai program bantuan pemerintah.

Kata kunci: Kinerja Kebijakan, Strategi Kebijakan, UMKM.

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada bulan Desember 2019, telah menjadi masalah global di dunia termasuk di Indonesia. Pandemi mengakibatkan aktivitas produksi menjadi terhenti. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengatakan dengan adanya pembatasan pergerakan manusia yang mengakibatkan *supply* dan *demand shock* berlangsung secara bersamaan, menurunnya tingkat konsumsi masyarakat yang dipengaruhi berubahnya prioritas kebutuhan di masyarakat yang memilih berhemat, ketidakpercayaan dan anjloknya bursa saham, sehingga berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi yang besar. Jika hal ini terjadi maka akan mengakibatkan jumlah pengangguran yang semakin meningkat yang dapat mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan.

Di Indonesia, ada tiga implikasi yang terjadi, yaitu sektor perdagangan, sektor pariwisata, dan sektor investasi, dimana pada sektor perdagangan penopang paling besar adalah UMKM. UMKM di Indonesia terdiri dari 98-99 persen dari keseluruhan usaha, memiliki 97 persen dari seluruh tenaga kerja. Data sampai 17 April 2020, terdapat 37.000 pelaku UMKM terkena dampak pandemi Covid-19 (Setiawan, 2020, p. 1). Ada lima masalah yang dihadapi pelaku UMKM, yaitu : terdapat penurunan penjualan, permodalan, distribusi/operasional terhambat, produksi terhambat, dan sulitnya bahan baku.



Gambar 1. Persentase Permasalahan Yang Terjadi Terhadap UMKM Akibat Pandemi Covid-19

(Sumber : (Noor, 2020, p.14)

Untuk itu pemerintah mengambil beberapa kebijakan guna membantu memulihkan perekonomian secara cepat dan demi menyelamatkan perekonomian negara. Melalui penyiapan anggaran sebesar 123,46 triliun, disebarkan melalui : program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Bansos Sembako, Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) dan lain sebagainya. Semua program tersebut disinergikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kota.

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020, pemerintah pusat memberikan stimulus kepada Pemerintah Daerah, melalui : keringanan pembayaran cicilan, bantuan langsung tunai serta keringanan pembayaran air, listrik, serta pajak. Hal ini diharapkan dapat membantu UMKM tetap eksis di masa pandemi.

Kalimantan Timur sendiri, memiliki sekitar 313.401 UMKM yang tersebar disetiap wilayah Kabupaten dan Kota. Dimana sekitar 307.343 pelaku UMKM terdampak secara langsung oleh pandemi. Menurut data Bank Indonesia sekitar 90,10 persen pelaku UMKM mengalami dampak penurunan penjualan, dikarenakan keterbatasan pada aktivitas jual dan beli ditengah implementasi *social distancing* atau *physical distancing*. Untuk mendukung upaya menguatkan UMKM di masa pandemi ini, pemerintah daerah Kalimantan Timur bersinergi dengan Pemerintah Kota yang ada, salah satunya Pemerintah Kota Samarinda. Adapun strategi-strategi yang diterapkan, yaitu : menciptakan *marketplace* berupa aplikasi behambinan, gerakan nasional #BanggaBuatanIndonesia, melakukan kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR, serta penurunan kebijakan dari pemerintah pusat.

Selama masa pandemi, para pelaku UMKM dituntut bergerak cepat dengan memanfaatkan stimulus dari pemerintah. Pemanfaatan melalui cara pendaftaran langsung kepada Pemerintah Kota Samarinda agar masuk pada data base, sehingga apabila terdapat bantuan, maka akan cepat dilakukan diproses. Sebelum terjadi pandemi perkembangan UMKM berjalan dengan sangat baik, tetapi setelah terjadi pandemi Covid-19 menyebabkan dampak yang cukup besar pada perekonomian daerah maupun pada UMKM sendiri.

Kerangka Teori Kebijakan Publik

Menurut Dye, kebijakan publik adalah *public policy is whatever government choose to do or not to do*. Definisi ini bermakna bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah bukan swasta dan kebijakan publik merupakan pilihan yang harus dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh badan pemerintah (Islamy, 2009, p. 19). Menurut Easton, kebijakan publik adalah *the authoritative allocation of values for whole society*. Terlihat jelas definisi ini menyatakan bahwa pemilik suatu otoritas dalam sebuah sistem politik yang dinyatakan syah dalam hal ini pemerintah, yang dapat melakukan sesuatu terhadap masyarakatnya dan pilihan pemerintah pula untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu yang diwujudkan dalam bentuk pengalokasian sebuah nilai-nilai (Subarsono, 2015, p. 3). Kebijakan publik yang baik harus memiliki pengaruh yang sangat nyata dalam kehidupan di masyarakat.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat pandemi Covid-19 diberbagai sektor merupakan strategi dalam menyelamatkan masyarakat Indonesia dari keterpurukan.

Menurut Dunn (2003, p. 22), tahapan kebijakan publik yaitu sebagai berikut : a) Tahap penyusunan agenda, b) Formulasi kebijakan, c) Tahap adopsi kebijakan, d) Implementasi kebijakan, e) Penilaian kebijakan. Tahapan ini merupakan satu kesatuan dimana diharapkan mampu menciptakan suatu kebijakan yang efektif dan efisien dalam memberikan solusi terhadap isu-isu publik.

Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier, mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus penelitian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab, 2008, p. 65). Menurut Ripley dan Franklin, implementasi ialah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Hal ini mengacu kepada beberapa aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan serta maksud dari hasil yang ingin dicapai.

Dalam implementasi suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh beberapa hal yang dapat menyebabkan kebijakan berhasil atau tidak. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin dapat ditinjau melalui tiga perspektif, yaitu : 1) Perspektif kepatuhan, untuk melihat keberhasilan suatu implementasi dari kepatuhan pegawai pelaksana lapangan terhadap atasan mereka, 2) Perspektif kelancaran, untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi dari kelancaran sebuah rutinitas dan tidak adanya persoalan, 3) Perspektif kepuasan, untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi yang mengarah pada kinerja yang mampu memuaskan semua pihak, terutama pada kelompok penerima manfaat yang diharapkan (Subarsono, 2015, p. 95).

Kerangka Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan

Kinerja bisa diartikan sebagai suatu keberhasilan (kesuksesan) dari tindakan, tugas atau operasi yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau oleh organisasi. Kinerja seperti itu dapat merujuk pada suatu keluaran (*output*), hasil (*outcome*) ataupun pencapaian (*accomplishment*). Dalam suatu kerangka logis pengukuran kinerja implementasi sebuah kebijakan, memiliki dua indikator utama dalam mengukur kinerja, yaitu : *output* dan *outcome*. Ripley mengatakan berbagai indikator yang dapat digunakan dalam menilai kualitas *output*, yaitu :

- a. Akses, dapat diartikan adanya tanggung jawab dari para pembuat kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan atau program yang dibuat dapat dengan mudah dikontak oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran apabila mereka membutuhkan suatu informasi maupun untuk menyampaikan pengaduan.

- b. Cakupan, dapat diartikan bahwa kebijakan atau program yang dibuat harus memiliki cakupan yang menyeluruh, menyentuh kelompok sasaran secara luas.
- c. Frekuensi, untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan.
- d. Bias, untuk melihat apakah terdapat penyimpangan kepada kelompok sasaran.
- e. *Service delivery* (ketepatan layanan), untuk menilai *output* suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu.
- f. Akuntabilitas, untuk melihat apakah implementator dapat mempertanggungjawabkan tugas yang sudah diberikan.
- g. Kesesuaian program dengan kebutuhan, dapat diartikan apakah suatu kebijakan/program yang diberikan kepada kelompok sasaran telah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau tidak (Purwanto and Sulistyastuti, 2012, p. 106).

Indikator kedua menurut Ripley dalam menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu *policy outcome*. Indikator ini sangat terkait dengan perubahan pada kondisi masyarakat yang merupakan kelompok sasaran suatu kebijakan/program, dimana memiliki kondisi awal yang tidak diinginkan menuju ke kondisi baru yang lebih baik/diinginkan. Hasil dari kebijakan ini disusun merupakan konsekuensi lanjutan dari keluaran kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran. Penilaian pada indikator ini meliputi : jangka pendek, dengan aspek kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan seterusnya; jangka menengah, dengan aspek aksi (perilaku dan praktik/profesi) dan pengambilan kebijakan; dan jangka panjang, meliputi aspek ekonomi, sipil, sosial, dan sebagainya (Purwanto and Sulistyastuti, 2012, p. 107).

UMKM

UMKM merupakan usaha perseorangan maupun bersama-sama dengan adanya pengelompokan berdasarkan omzet, modal, dan jumlah tenaga kerja yang memiliki kriteria masing-masing guna mendapatkan sebuah hasil berdasarkan pada tujuan berdirinya suatu usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1, dikatakan UMKM memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Usaha Mikro : belum memiliki badan usaha, memiliki jumlah pegawai yang sedikit, belum memiliki struktur organisasi secara formal, bisnis masih berbasis keluarga, usaha yang baru merintis, dan mengandalkan pasar yang berada di sekitar lingkungan yang mayoritas berada dalam kelompok dengan tingkat pendapatan rendah.
2. Usaha Kecil : berbadan hukum, memiliki jumlah karyawan yang tidak banyak, profesional serta digaji, belum mempunyai struktur organisasi secara formal, sudah mengikuti teknologi, memiliki pasar yang lebih luas dari usaha mikro, dan memiliki orientasi menghasilkan profit yang besar.
3. Usaha Menengah : umumnya manajemen dan organisasi sudah memiliki pembagian tugas yang jelas, mampu menjalankan manajemen keuangan bersamaan dengan hitungan akuntansi secara terarah, memiliki aturan serta organisasi perburuhan, terdaftar pada jamsostek dan kesehatan, memiliki legalitas perusahaan dengan lengkap seperti ijin dari tetangga, ijin

membangun usaha, ijin mendirikan tempat, NPWP, usaha pengelolaan limbah, dan lain-lain.

UMKM memiliki kecenderungan untuk bertahan serta mengantisipasi sebuah kelesuan pada perekonomian yang merupakan akibat dari inflasi ataupun faktor-faktor lain. Dalam perkembangannya UMKM memiliki kendala maupun hambatan yang didasarkan kepada dua faktor, yaitu :

1. Faktor Internal, meliputi modal yang kurang, terbatasnya sumber daya manusia, jaringan sebuah usaha serta kemampuan penetrasi pasar yang lemah.
2. Faktor Eksternal, meliputi tidak kondusifnya suatu iklim usaha, prasarana dan sarana usaha yang masih terbatas, implikasi dari otonomi daerah, implikasi dari perdagangan bebas (Hafsah, 2004, p. 11).

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2019, p.100). Lokasi penelitian terletak di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Samarinda Seberang. Sumber berasal dari data yang dikumpulkan melalui data primer yang diambil menggunakan teknik wawancara semi-struktur (Creswell, 2017, p. 100) dan menentukan informannya dengan menggunakan model *purposive sampling* (Moleong, 2006, p. 25). Sumber dari data lainnya adalah data sekunder berupa rencana strategis Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan Data Badan Pusat Statistik. Model pengumpulan suatu data dilakukan melalui studi lapangan yang berupa wawancara, dokumentasi, observasi partisipatif pasif dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2017, p. 227). Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, analisis isi kualitatif dan analisis data sekunder (Nugroho, 2014, p. 100).

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan UMKM di Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda, dimana berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Samarinda, pada masa pandemi persentase pertumbuhan UMKM tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,5% dari tahun 2019, walaupun tidak terlalu tinggi, tetapi hal ini diharapkan mampu membawa perekonomian di Kota Samarinda menjadi lebih baik. Sedangkan untuk tahun 2021 diharapkan UMKM mengalami peningkatan persentase pertumbuhan sebesar 0,1%.

Tabel 1. Persentase Pertumbuhan UMKM Tahun 2018-2021 Wilayah Kota Samarinda

No	Klasifikasi Usaha	Tahun							
		2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1	Usaha Mikro	58.732	4,5	61.199	4,2	64.075	4,7	67.151	4,8

2	Usaha Kecil	24.569	2,0	25.085	2,1	25.662	2,3	26.303	2,5
3	Usaha Menengah	3.467	1,3	3.515	1,7	3.757	1,7	3.639	1,8
Jumlah		86.768	3,6	89.799	3,9	93.312	3,9	97.093	4,0

Sumber : Data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

Program yang diberikan oleh pemerintah Kota Samarinda selama masa pandemi Covid-19, yaitu Bimtek, Pelatihan, Aplikasi Behambinan, Pasar Murah, BLT, dan BPUM. Untuk bantuan-bantuan dari Pemerintah Kota Samarinda, seperti Pelatihan-Pelatihan dan Bimtek, sebenarnya telah dilakukan sejak lama dan merupakan agenda tahunan. Hal ini terlihat dari Rencana Strategi Tahun 2019-2023 dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM yang disinergikan dengan Rencana Strategi Tahun 2016-2021 Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda. Sedangkan untuk Behambinan, Pasar Murah, Pameran UMKM, Bantuan Bahan Baku, BLT dan BPUM, dilakukan untuk pelengkap dari kebijakan Pemerintah Pusat dalam membantu mempertahankan eksistensi UMKM di masa pandemi.

Mekanisme dari pelaksanaan pelatihan dan Bimtek, adanya pemberian informasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, melalui media sosial milik pemerintah dan informasi disampaikan langsung oleh para penyuluh kepada UMKM yang terdata, kapan dan dimana pelatihan atau bimtek akan dilaksanakan. Begitupun untuk informasi pameran, pasar murah, behambinan, dimana semua pelaku UMKM bisa mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Sedangkan program-program yang merupakan turunan dari pemerintah pusat seperti BLT dan BPUM, dapat dilihat mekanismenya sebagai berikut :



Gambar 2. Prosedur Pengajuan Calon Penerima BPUM
 Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2020

Kinerja Implementasi Strategi Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda Untuk UMKM di Masa Pandemi Covid-19

Kinerja suatu kebijakan didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkatan suatu pencapaian implementasi untuk mewujudkan sasaran dan tujuan sebuah kebijakan, baik itu berupa keluaran kebijakan maupun hasil dari kebijakan.

1) Keluaran Kebijakan (Output)

a. Akses

Indikator yang menjawab pertanyaan apakah program/kebijakan yang diberikan dapat mudah untuk dijangkau oleh para kelompok sasaran. Pemerintah telah membuka akses informasi melalui media sosial, media televisi, dibantu dengan klinik bisnis dalam penyebaran informasi. Pembuatan surat ijin usaha untuk skala mikro dilakukan oleh pihak Kecamatan, sedangkan untuk Usaha Kecil dan Menengah dilakukan oleh Dinas Pelayanan Satu Pintu. Ditambah lagi bisa menggunakan media online, yaitu OSS, hal ini untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam *social distancing*.

UMKM yang merupakan kelompok sasaran mendapatkan akses yang cukup mudah. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk indikator akses yang dicapai oleh pemerintah Kota Samarinda cukup berhasil.

b. Cakupan

Indikator yang dipakai untuk melihat seberapa besar jangkauan sebuah kebijakan/program kepada kelompok sasaran. Masih ada kelompok sasaran yang tidak masuk dalam cakupan strategi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Kota Samarinda. Hal ini bisa dilihat dengan masih adanya UMKM yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maupun penerima pelatihan-pelatihan tetapi tidak tersentuh informasi tersebut.

Selanjutnya untuk seluruh program yang diberikan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk UMKM di masa pandemi Covid-19 di tiga kecamatan dapat dikatakan mampu menjangkau kelompok sasaran. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah pelaku UMKM melakukan pendaftaran di Kecamatan maupun di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda untuk bisa masuk ke data base pemerintah sebagai penerima bantuan maupun pelatihan.

Melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa cakupan sudah terjangkau tetapi masih belum luas. Karena masih ada pelaku UMKM yang belum tersentuh informasi dari aparaturnya paling bawah.

c. Frekuensi

Indikator ini untuk melihat tingginya informasi diberikan kepada kelompok sasaran sehingga mendapatkan informasi yang dimiliki oleh suatu kebijakan dari pemerintah Kota Samarinda. Informasi dari pemerintah mengenai program-program yang dibuat diberikan melalui media sosial, melalui penyuluh, bahkan melalui klinik bisnis. Kemudian UMKM bisa mencari tahu tentang informasi tersebut, baik secara perseorangan maupun berkelompok. Masyarakat sebagai kelompok sasaran sudah mendapatkan frekuensi yang baik dalam hal penerimaan informasi yang diberikan sampai kepada tingkat Kecamatan dan Dinas Kota yang mengirimkan penyuluh ketempat-tempat para UMKM secara langsung.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa frekuensi yang diberikan oleh pemerintah Kota Samarinda kepada kelompok sasaran sudah memadai. Hal ini dilihat bahwa kelompok sasaran mampu mendapatkan informasi secara lengkap mengenai mekanisme dan informasi adanya bantuan.

d. Bias

Untuk mengetahui apakah kebijakan atau program yang diberikan terdapat penyimpangan saat diimplementasikan kepada kelompok sasaran dapat dilihat pada indikator bias. Persyaratan yang diberikan oleh pemerintah dalam setiap program yang diberikan untuk kelompok sasaran cukup jelas diterima. Bias dari program yang diberikan, berupa adanya dokumen tambahan dalam mengurus pemberkasan saat mendaftar, seperti ada form surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang berisi bahwa UMKM bertanggung jawab terhadap usaha mereka. Dan bias yang ada dalam persyaratan Kartu Keluarga yang setiap anggota keluarga dapat memperoleh bantuan walaupun dalam satu tempat usaha dengan usaha yang berbeda-beda. Juga terdapat bias mengenai kapan bantuan tersebut ada, berapa jumlah dan kapan bisa diterima oleh kelompok sasaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat bias pada kinerja implementasi strategi kebijakan pemerintah Kota Samarinda untuk UMKM di masa pandemi Covid-19.

e. Ketepatan layanan

Indikator untuk menjawab apakah program-program yang telah diberikan tepat pada waktunya atau tidak. Saat terjadi pandemi kelompok sasaran yaitu UMKM tidak mampu bertahan dan menutup usahanya, baik sementara maupun permanen. Tetapi setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah, UMKM semakin bisa eksis dan pertumbuhannya semakin meningkat dan semakin kreatif.

Dilihat dari ketepatan layanan pada program behambinan, pasar murah, pelatihan-pelatihan, bimtek, BLT, dan BPUM sudah tepat waktu. Hal ini dilihat dari waktu keluarnya kebijakan berupa aturan maupun bantuan pada awal pandemi begitu berpengaruh terhadap kelompok sasaran, walaupun memiliki dampak yang berbeda-beda.

f. Akuntabilitas

Indikator yang melihat apakah suatu tindakan dari para aparatur negara sebagai pelaksana dapat memiliki pertanggung jawaban atau merupakan suatu bentuk dari penyimpangan.

Dalam memberikan pelayanan kepada kelompok sasaran, pemerintah berupaya dengan maksimal dalam pemberian informasi maupun pelayanan saay proses pendaftaran para pelaku UMKM. Akuntabilitas Pemerintah sudah akuntabel.

g. Kesesuaian dari program dengan kebutuhan

Indikator digunakan melihat apakah suatu program/kebijakan yang diberikan kepada kelompok sasaran telah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau tidak.

Saat bantuan BLT dan BPUM diberikan kepada kelompok sasaran, tahap pertama beluma ada kesiapan dari pemerintah daerah dalam implementasinya, sehingga terdapat kerumunan massa di dinas-dinas terkait. Tetapi pada tahap kedua, pemerintah daerah sudah siap dengan meminimalisasi kerumunan massa dengan

menerapkan pendaftaran secara online, dan dilakukan pembagian tugas antara pemerintah Kota Samarinda ke Kecamatan-Kecamatan.

Melihat bantuan dari pemerintah berupa pelatihan-pelatihan dan bantuan langsung tunai sudah sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran di masa pandemi. Hal ini dilihat dari semakin mampu para UMKM bertahan dengan bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah.

2) Hasil Kebijakan (*Outcome*)

a. Outcome jangka pendek

Indikator ini untuk melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu membuat masyarakat sebagai kelompok sasaran dapat melakukan perubahan sesuai kondisi saat ini. Pada jangka pendek ini, untuk meningkatkan kesadaran UMKM pentingnya bersinergi dengan pemerintah melalui penyuluhan, sedangkan untuk pengetahuan ditingkatkan melalui *sharing experinece*, untuk keterampilan, ditingkatkan melalui pelatihan dan bimtek.

Dilihat dari kesadaran kelompok sasaran terhadap pentingnya saling bekerjasama dengan pemerintah sebagai implementator guna mewujudkan eksistensi UMKM di masa pandemi Covid-19. Dari segi pengetahuan, baik pemerintah maupun UMKM melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan membuat pemerintah sebagai implementator dan UMKM sebagai kelompok sasaran menjadi meningkat, diimbangi dengan meningkatnya keterampilan yang semakin kreatif dan inovatif.

b. Outcome jangka menengah

Indikator ini untuk melihat perubahan perilaku kelompok sasaran dari tradisional maupun modern. Dan bagaimana pemerintah mampu memberikan kebijakan yang tepat kepada kelompok sasaran dalam menghadapi berbagai situasi. Kebijakan yang diberikan melalui program-program yang dibuat oleh pemerintah Kota Samarinda sudah mampu menjangkau kelompok sasaran. Perilaku dari kelompok sasaran mampu berubah sesuai harapan yang diinginkan oleh pemerintah. Dan diharapkan program-program tersebut dapat terus dilanjutkan dengan pembenahan terhadap penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Hasil dari kebijakan pemerintah baik itu social distancing, Protokol Kesehatan, BLT UMKM, BPUM, menghasilkan suatu pengambilan kebijakan atau sebuah keputusan tentang tindak lanjut program yang diterapkan, dimana diharapkan saat terjadi wabah besar dikemudian hari, sudah terdapat kebijakan yang berkekuatan hukum tetap.

c. Outcome jangka panjang

Indikator ini untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan ini dijalankan, sehingga dapat menjadi masukan saat membuat kebijakan pada waktu yang akan datang dalam situasi yang mendesak. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program-program yang diterapkan di daerah tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat. Dari kebijakan tersebut, maka pemerintah daerah membuat program-program apa saja yang harus dibuat guna mendukung kebijakan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa program-program yang diberikan oleh pemerintah Kota Samarinda diharapkan mampu menyelamatkan para UMKM di masa pandemi Covid-19, sehingga mampu bertahan

dan memiliki produk yang kreatif serta inovatif untuk bersaing di daerah lain dan semakin banyak UMKM yang naik kelas.

Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Samarinda Dalam Kinerja Implementasi Untuk UMKM di Masa Pandemi Covid-19

Kendala dalam implementasi kebijakan publik adalah unsur yang menjadikan suatu kebijakan tidak terlaksana dengan baik, sehingga hasil dan manfaatnya tidak maksimal diterima oleh kelompok sasaran yaitu UMKM. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah kota dan kecamatan serta lembaga keuangan sebagai penyalur bantuan kepada kelompok sasaran sehingga terjadi ketidak seimbangan saat implementasi kebijakan di lapangan; sumber daya manusia di instansi pemerintah yang kurang proposional mengingat tingginya jumlah UMKM di Kota Samarinda, sehingga mengakibatkan adanya pelaku UMKM yang belum tersentuh para penyuluh maupun informasi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kinerja implementasi strategi kebijakan Pemerintah Kota Samarinda untuk UMKM di masa pandemi Covid-19, yang dilakukan di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, dan Kecamatan Samarinda Seberang, cukup berhasil serta berjalan dengan baik, dilihat dari pertama indikator Output yang meliputi 7 aspek dimana 6 aspek telah terpenuhi mulai dari akses, cakupan, frekuensi, *service delivery*, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan; kedua indikator *Outcome* yang meliputi 3 aspek yaitu : *Initial Outcome*, *Intermediate Outcome*, dan *Long-Term Outcome*; terlihat adanya penambahan jumlah UMKM di masa pandemi Covid-19 serta eksistensi UMKM yang semakin mampu bertahan. Namun demikian masih terdapat bias dalam implementasi strategi kebijakan tersebut. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Samarinda yaitu kurangnya koordinasi yang baik antar aparatur pelaksana kebijakan; kurangnya jumlah dari SDM di instansi pemerintahan jika dibandingkan dengan jumlah dari UMKM yang ada; Pendataan para pelaku UMKM yang belum maksimal; Kurangnya informasi mengenai pentingnya surat ijin usaha dan informasi bantuan dari pemerintah kepada pelaku UMKM; Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bawah yang tidak bersentuhan secara langsung dengan digitalisasi; dan Kondisi sosial budaya di masyarakat.

Rekomendasi

Peneliti merekomendasikan beberapa saran, diantaranya 1) Melakukan rapat antar aparatur koordinasi yang dilaksanakan 6 bulan sekali, di wilayah-wilayah sasaran atau kepada kelompok sasaran agar tidak terjadi bias, 2) menambah SDM di Instansi pemerintahan agar sebanding dengan jumlah UMKM, 3) Memiliki data base yang akurat melalui level RT agar lebih komprehensif, 4) Meningkatkan sosialisasi kepada para pelaku UMKM, baik melalui brosur, media sosial, dan iklan, 5)

Memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM agar merubah perilaku dari konvensional ke digitalisasi atau dari tradisional ke modern, 6) Peningkatan anggaran demi terpenuhinya strategi-strategi yang ditetapkan melalui program-program yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Jakarta
- Creswell, J. W. (2017) *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Keti. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2018) *30 Keterampilan Esensial Untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hafsah, M. J. (2004) 'Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)', *Infokop Nomor 25 Tahun 2015*, 12, pp. 40–44. Available at: <http://jurnal.smeccda.com/index.php/infokop/article/download/60/57>.
- Islamy, M. I. (2009) *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, M. B., Huberman, M. A. and Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, E. A. and Sulistyastuti, D. R. (2012) *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Subarsono, A. (2015) *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Wahab, S. A. (2008) *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.